

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SARANA AIR BERSIH KAWASAN PERDESAAN DI DESA INSIL KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

CHIKITA PONTICHA LANGITAN

ALDEN LALOMA

SALMIN DENGO

Email : chikiplangitan@gmail.com

Abstract : This study aims to find out about the implementation of clean water facility development policies in rural areas in Insil Village, Passi Timur District, Bolaang Mongondow Regency. Type of qualitative descriptive research. All data presented is in accordance with primary and secondary data. Data collection techniques based on observation, interviews and documentation. Data obtained from various sources were analyzed and conclusions were drawn. The problem in this research lies in the implementation of the policy of developing clean water facilities that have not been running optimally so that some people still have difficulty getting clean water. The findings of this study indicate that the implementation of clean water facility development policies in rural areas in the Insil Village of Passi Timur sub-district Bolaang Mongondow can be seen from the indicators of this research that communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fully implemented. The communication process that occurs in the implementation of clean water facility development policies to the lack of support by the apparatus resources in implementing clean water facility development policies causes the implementation of these policies to not be carried out effectively. The village government need to conduct direct socialization of programs or activities carried out related to the development of clean water facilities as well as improvements in coordination between relevant organizations or institutions and increase information regarding the implementation of clean water facility development policies.

Keywords : Policy Implementation, Development, Clean Water Facilities, Rural Areas.

PENDAHULUAN

Berbicara kebijakan maka kita akan berfikir tentang suatu keputusan yang bijak, artinya bahwa keputusan yang diambil harus didasari dengan kepentingan masyarakat umum tanpa adanya diskriminatif. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang di inginkan. Kebijakan pemerintah merupakan sebuah produk hasil usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, salah satunya ialah ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan kawasan perdesaan. Namun dalam pengimplementasian kebijakan oleh setiap desa berbeda-beda sebab menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan desa tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah ialah terdapat pada ketentuan Undang-undang

Desa yang mendefinisikan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya pada kesejahteraan masyarakat desa. Serta tujuan dari pembangunan desa itu sendiri yang tertera dalam pasal 78 ayat (1) mengatakan bahwa tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Masih belum berkembangnya kawasan perdesaan di Indonesia ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Kawasan perdesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dengan kawasan perkotaan, terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan. Diberbagai pelosok

tanah air masih terdapat ribuan perdesaan yang sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya.

Dalam meningkatkan perkembangan sosial maupun kegiatan ekonomi serta dalam bidang lainnya di kawasan perdesaan, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting. Pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat berjalan dengan lancar jika sarana dan prasarananya tidak baik. setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi ataupun dalam bidang lainnya mempunyai prasarananya masing-masing, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu dalam menyukseskan pembangunan kawasan perdesaan, pemerintah desa harus lebih memperhatikan pengembangan sarana dan prasarananya.

Pengembangan sarana terutama dalam sarana air bersih sangat di perlukan dan diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga ketersediaan air bersih sangat penting untuk memenuhi hidup manusia. Penyediaan air bersih tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sangat berkaitan dengan kebutuhan air untuk sarana-sarana umum, sosial dan ekonomi sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk.

Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan akan air bersih. Di daerah perdesaan banyak pelayanan air bersih yang belum dapat memenuhi tingkat kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan adanya penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, karena melalui kualitas dan kuantitas yang mencukupi dalam perencanaan diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat desa. Selain itu, masyarakat desa akan terlibat langsung dalam penyediaan dan pengelolannya sehingga diharapkan kelestarian penyediaan sarana air bersih dapat lebih terjamin.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat.

Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung pada kualitas air yang sangat baik dan kuantitas yang cukup. Air juga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman pangan dan non pangan serta kelangsungan hidup hewan yang menjadi daya dukung kehidupan manusia. Air juga dibutuhkan untuk kegiatan pertanian dan proses produksi yang berdampak pada pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu ketersediaan air dapat menurunkan water borne disease sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan desa agraris yang terkenal dengan suhu dinginnya, walaupun suhu di Desa Insil sangat dingin tetapi di sana merupakan desa yang memiliki banyak potensi sumber daya alamnya, yaitu memiliki berbagai macam sayur-sayuran seperti kol, sawi, daun bawang, kentang dan lain sebagainya. Sumber pendapatan masyarakat desa Insil 80% berasal dari pertanian dan 20% dari ASN. Walaupun desa ini kaya akan sumber daya alamnya tetapi desa ini belum berkembang sepenuhnya, terutama dalam pengembangan sarana air bersih untuk masyarakat. Pengembangan sarana air bersih belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat desa yang belum mendapatkan pelayanan air bersih secara merata.

Di Desa Insil masyarakat mengandalkan sumur yang terletak di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Namun tidak semua rumah memiliki sumur hanya sekitar 5% dari sebagian masyarakat Desa Insil yang lebih banyak menggunakan Air Swadaya Masyarakat. Pada saat musim panas sumur warga sering mengalami kekeringan, sehingga masyarakat menggunakan mata air yang terletak di Desa Insil sebagai sumber air utama.

Sarana air bersih yang dibangun oleh pemerintah desa juga belum berjalan dengan optimal karena keberadaan sarana air bersih yang baru dibangun satu bak sehingga

masyarakat yang terletak jauh dari mata air ataupun bak penampungan masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Mengingat pentingnya suatu implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih bagi kehidupan masyarakat desa serta untuk pembangunan kawasan perdesaan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam berdasarkan kenyataan yang terjadi. Selain penting untuk diteliti, hal ini juga bisa mengukur pentingnya implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan, idealnya proses pembuatan kebijakan merupakan hasil dialog antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibidang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Mazmanian dan Sabatier (2001 : 68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan,
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Sementara itu menurut Edward (2002 : 125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Sedangkan model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi sumber daya.
- 2) Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi
Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP (*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Siagian (2009 : 9) memberikan pengertian tentang pembangunan (*development*) sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Ginanjar 1994 (dalam Masje Pangkey dan Joorie Ruru 2017) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Moenir 1992:119 (dalam Michael M. Rengkung dan Esli D. Takumansang 2017) mendefinisikan bahwa sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka

kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Menurut Kodoatie (2003), air bersih adalah air yang dipakai sehari-hari untuk keperluan mencuci, mandi, memasak dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan Menurut Suripin (2002), yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman (sehat) dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong (2010) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung yang didapat melalui informan, karena tanpa adanya informan peneliti tidak bisa mendapatkan banyak informasi yang mengalir masuk, khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diambil dari unsur terkait dalam masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini, masyarakat Desa Insil sebanyak 7 orang dan Pemerintah Desa Insil sebanyak 3 orang.

Fokus penelitian dalam penelitian ini berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (2002 : 125) adalah : (1) Proses komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. (2)

Kemampuan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil. (3) Proses disposisi dalam implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil. (4) Kemampuan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil.

Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian kebijakan pengembangan sarana terutama dalam sarana air bersih sangat diperlukan perhatian oleh pemerintah desa serta masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga ketersediaan air sangat penting untuk memenuhi hidup manusia. Penyediaan air bersih tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga sangat berkaitan dengan kebutuhan air untuk sarana-sarana umum sosial dan ekonomi sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk.

Namun pengimplementasian kebijakan oleh masing-masing pembuat kebijakan berbeda-beda. Sehingga perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Selain itu, dilihat dari hasil temuan pada penelitian terdahulu yang telah dipilih sebelumnya, yang dilakukan oleh Yerry Budiman, Sarah Sambiran dan Johannes Kaawoan (2015) tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sesuai harapan, hal tersebut dilihat dari sumber daya aparat pemerintah desa atau petugas pengelolaan air bersih

masih belum mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta belum mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai juga cukup menghambat pelaksanaan di lapangan. Selain itu, dilihat dari struktur birokrasi, pembagian kerja petugas yang masih terlalu gemuk sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan pengelolaan air bersih dilapangan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan efisien.

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh implementor atau para pelaksana kebijakan.

Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (2002 : 125) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel antara lain yaitu (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Sesuai dengan teori model implementasi dari Edward III tersebut, membuat peneliti memiliki bahwan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam kajian implementasi kebijakan melalui komunikasi, peneliti mengkaji bahwa komunikasi yang terjadi di sini yaitu alur komunikasi satu arah yang mana tidak beraturan tetapi mempunyai tujuan tertentu. Komunikasi ini lebih bersifat seperti himbuan yang dituruti atau tidak dituruti tidak masalah. Dilihat dari informasi yang berikan oleh aparat pemerintah desa yang hanya melalui pengumuman dalam acara

hajatannya maupun keduakaan, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih, sebab kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan akan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya ketersediaan sarana-sarana pendukung dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dilihat dari aspek sumber daya, secara kuantitas aparat pemerintah Desa Insil sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan. Namun dari segi kualitas sumber daya aparat pemerintah desa masih dikatakan kurang untuk dapat menunjang kinerja yang efektif dari seluruh bidang untuk pengimplementasian kebijakan tersebut. Dari segi sumber daya finansialnya dapat dikatakan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih. Masih perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program pengembangan air bersih kawasan perdesaan.

Dari aspek disposisi, sikap aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan program pengembangan sarana air bersih sudah cukup baik karena aparat pemerintah desa bertanggung jawab serta transparansi atau terbuka kepada masyarakat desa dan juga sangat kooperatif sehingga tidak adanya penyelewengan yang terjadi.

Dari aspek struktur birokrasi sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih. Dapat dilihat dari penetapan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan tersusun rapi serta sistematis sehingga dapat memudahkan pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini juga telah dibentuk pembagian kerja atau struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan yang mana dipertanggung

jawabkan langsung kepada sangadi Desa Insil dan dibantu oleh sekretaris desa dan juga kepala urusan ekonomi pembangunan Desa.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.
2. Kualitas sumber daya aparat pemerintah desa belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan di Desa Insil.
3. Disposisi (komitmen, konsistensi) aparat pemerintah desa dalam menjalankan program air bersih sudah cukup baik.
4. Mekanisme prosedur dalam implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih berjalan dengan baik dilihat dari pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk teknis dan organisasi pelaksana sudah tersusun sesuai kebutuhan implementasi kebijakan.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi secara langsung serta pemberian edukasi atau informasi mengenai pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan.
2. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara organisasi atau lembaga serta kualitas dan kuantitas

maupun sarana dan prasarana dukungan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Diharapkan pemerintah desa lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam pelaksanaan program pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengembangan sarana air bersih kawasan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Y., S. Sambiran dan J. Kaawoan. 2015. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalekube Kecamatan Takuba Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Politico*. 4 (1).
- Edward, G. C. III. 1984. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Kartasmita, Ginanjar. 1994. Pembangunan Infrastruktur Seminar Pembangunan Konsep dan Implikasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mazmanian, D. A. dan P. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA : Scott Foresman and Company.
- Meter, D. S. V. dan C. E. V. Horn. 1975. *The Policy Impelentation Process*. Beverly Hill : Sage Publication.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Molelong, L. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pangkey, M. dan J. Ruru. 2017. Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. 4 (48).
- Rengkung, M. dan E. Takumansang. 2017. Ketersediaan Prasarana Sarana dalam Mendukung Kawasan Metropolitan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Unsrat*. 4 (2).
- Sondang, P. S. 2009. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta : Penerbit Andi.